

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANDUNG

**JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG**

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Urusan Pendidikan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Mencakup : - Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta - Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) - Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)	Persetujuan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Mencakup : - Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri - Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri - Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Negeri		
		2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Mencakup : - Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) - Izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) - Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) - Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - Izin Penyelenggaraan Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta - Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa swasta - Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta	Izin			
II.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal : Mencakup : - Izin Penyelenggaraan Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi				
III.	Urusan Kebudayaan	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal : Mencakup : - Izin penyelenggaraan pendidikan kebudayaan				
IV.	Urusan Kesehatan Sarana Pelayanan Medis	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Persetujuan	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah		
		2. Izin Operasional Rumah Sakit	Izin	2. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah		
		3. Izin Operasional Klinik	Izin	3. Izin Operasional Klinik Pemerintah		
				4. Izin Operasional Puskesmas		
	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	1. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Umum dan Khusus (Laboratorium Klinik Umum Pratama)	Izin	1. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiolog Diagnostik		

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan	
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan		Layanan Non Perizinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin	2. Izin Penyelenggaraan Optikal		
		3. Izin Apotek	Izin	3. Izin Pelayanan Hemodialisis		
		4. Izin Toko Obat	Izin	4. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalah-gunaan dan Keterangan-tungan Narkotik dan Zat Adiktif Terlarang		
		5. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sertifikat	5. Izin Teknis Pelayanan Kesehatan SPA Tradisional		
		6. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin			
	Tenaga Pelayanan Kesehatan					
	Tenaga Medis :			1. Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis :		
				- Dokter		
				- Dokter Gigi		
				- Dokter Spesialis		
				- Dokter Gigi Spesialis		
				2. Dokter Internsip		
				3. Izin Pengobatan Komplementer - Alternatif		
	Tenaga Keperawatan :			1. Izin Pelayanan Perawat		
				2. Izin Pelayanan Bidan		
				3. Izin Terapis Gigi dan Mulut		
				4. Izin Pelayanan Perawat Anastesi		
	Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan :			1. Izin Apoteker		
				2. Izin Tenaga Tekns Kefarmasian		
				3. Izin Tenaga Gizi		
				4. Izin Tenaga Sanitarian		
	Tenaga Keterampilan Fisik :			1. Izin Fisioterafis		
				2. Izin Ortotis Prostetis		
				3. Izin Okupasi Terafis		
				4. Izin Terafis Wicara		
				5. Izin Pengobatan Tradisional		
				6. Izin Praktek Akupunktur Terapis		
	Tenaga Ketechnisan Medis :			1. Izin Radiografer		
				2. Izin Tenaga Refrasiionis Optisen / Optometris		
				3. Izin Perekaman Medis		
				4. Izin Teknisi Gigi		
				5. Izin Analis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
				6. Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E)		
	Kesehatan Tertentu	1. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Sertifikat	1. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional		
		2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat	2. Surat Terdaftar Tukang Gigi		
				3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel		
				4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran		
				5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum		
				6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum		

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga		
V.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Usaha	Persetujuan	1. IMB Non Peruntukan Usaha kecuali IMB untuk Rumah Tinggal di luar Kawasan Perumahan sampai dengan luasan 250 m ² dan Rumah Tinggal di Kawasan Perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m ² .		
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Persetujuan	2. Izin Penyelenggaraan Reklame		
				3. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)		
				4. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama		
VI.	Urusan Sosial			1. Izin Operasional Yayasan/ Organisasi Sosial dan Pantii		
				2. Izin Undian dan Sumbangan		
VII.	Urusan Tenaga Kerja	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Persetujuan			
VIII.	Urusan Pertanahan	1. Izin Lokasi	- Persetujuan	1. Surat Persetujuan Perubahan dan/atau Penambahan Jenis Kegiatan dalam Izin Lokasi		Luas > 1 ha
			- Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR)			Luas ≤ 1 ha (Objek UPL/UKL)
			- Informasi Tata Ruang (ITR)			Luas ≤ 1 ha (Objek SPPL)
IX.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan	Persetujuan			
		2. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin			
		3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin			
		4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin			
X.	Urusan Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Mencakup : a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek : - Izin Baru - Pembaharuan Masa Berlaku Izin - Penambahan Kendaraan - Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : - Izin Baru	Persetujuan	1. Izin Insidentil (Dispensasi Keluar Lintasan Trayek)	1. Rekomendasi Angkutan Umum Kewenangan Provinsi/Pusat (dalam Trayek AKDP/AKAP dan Tidak Dalam Trayek)	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan Masa Berlaku Izin - Penambahan Kendaraan - Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan 				
XI.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam	Persetujuan		1. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas Koperasi	
		2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin			
		3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Persetujuan			
		4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin			
		5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin			
XII.	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Persetujuan			
XIII	Urusan Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Persetujuan			
XIV.	Urusan Pertanian					
	Bidang Perkebunan	1. Izin Usaha Perkebunan Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan. - Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. - Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. - Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman 	Persetujuan	1. Izin Konversi 2. Izin Diversifikasi 3. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan 4. Izin Luas Lahan		
		2. Pendaftaran Usaha Perkebunan Mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan - Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 	Persetujuan			
	Bidang Peternakan	1. Izin Usaha Peternakan	Persetujuan	1. Izin Perluasan Usaha		
		2. Pendaftaran Usaha Peternakan	Persetujuan	2. Persetujuan Prinsip		
	Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian	1. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (untuk izin importir, eksportir, dan produsen obat hewan).	Persetujuan	1. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri	1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Non Bibit (antar Daerah dalam Provinsi atau antar Provinsi dalam Pulau atau antar Provinsi beda Pulau)	
				2. Izin Praktek Dokter Hewan Bersama	2. Rekomendasi Nomor Kontrol VETERINER (NKV)	
				3. Izin Rumah Sakit Hewan	3. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. Izin Klinik Hewan		
				5. Izin Laboratorium Keswan dan Kesmavet		
				6. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus		
				7. Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan		
				8. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara asing		
				9. Izin Depo Obat Hewan		
				10. Izin Toko Obat Hewan		
				11. Izin Petshop / Poultry Shop		
				12. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)		
				13. Izin Usaha Pasar Hewan		
				14. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)		
				15. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIP Inseminator)		
				16. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)		
				17. Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)		
				18. Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)		
	Bidang Hortikultura	1. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Persetujuan		1. Rekomendasi Kebutuhan Benih Kentang Impor (Atlantik)	
		2. Izin Usaha Hortikultura Mencakup : - Izin Usaha perbenihan hortikultura - Izin Usaha budidaya hortikultura	Persetujuan			
		3. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura	Persetujuan			
	Bidang Tanaman Pangan	1. Izin Usaha Tanaman Pangan Mencakup : - Izin Usaha proses produksi tanaman pangan; - Izin Usaha penanganan pasca panen tanaman pangan; - Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; - Izin Usaha perbenihan tanaman.	Persetujuan			
		2. Pendaftaran Usaha Tanaman Mencakup : - Usaha proses produksi tanaman pangan; - Usaha penanganan pasca panen tanaman pangan; - Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen;	Persetujuan			

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XV.	Urusan Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Persetujuan	1. SIUP-MB Golongan B dan Golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung		
		2. Tanda Daftar Gudang	Persetujuan			
		3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persetujuan			
XVI.	Urusan Perindustrian	1. Izin Usaha Industri	Persetujuan		1. Surat Keterangan Kawasan Berikat (SKKB)	
		2. Izin Perluasan Usaha Industri	Persetujuan			
Jumlah		44 Layanan Perizinan		73 Layanan Perizinan	7 Layanan Non Perizinan	

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha sesuai Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Luar Lampiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Keterangan
		Jenis Perizinan Berusaha	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Nama izin tidak dihitung karena merupakan bagian dr izin sebelumnya

Nama izin tidak dihitung karena merupakan bagian dr izin sebelumnya

tenaga kefarmasian tdr dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

